

Makalah SEMNAS FISIP UT 2012

Sub Tema : Birokrasi dan Road Map MDGs 2015 di Indonesia

Pengirim : DIAN ARLUPI UTAMI, S.Sos, M.AP

NIP.197601252000032005

Dosen/PNS di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

E-mail : dian_unesa@yahoo.com

HP.081330109556/085730790282

REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENCAPAIAN MDGs 2015 DI INDONESIA

Abstrak

Oleh : Dian Arlupi Utami, S.Sos, M.AP

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan resolusi *United Nations* (PBB) yang diadopsi pada pertemuan pleno ke-8, *Millennium Summit*, pada tanggal 8 September 2000 yang ditandatangani oleh 192 negara anggota PBB dalam rangka mencapai *goals* pada tahun 2015.

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target MDGs telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam berbagai bentuk program, indicator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dilaksanakan melalui pencapaian 11 (sebelas) prioritas nasional dimana salah satunya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Pedoman Penyusunan RAD MDGs, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010).

Reformasi birokrasi dan Tata Kelola memiliki peran strategis untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional serta mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan.

Reformasi Birokrasi diharapkan dapat terimplementasi dengan baik, dilakukan secara bersama-sama dan komprehensif. Karena Reformasi Birokrasi bukan hanya persoalan kelembagaan, SDM,tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan public, tetapi semuanya harus terintegrasikan dalam bingkai Reformasi Birokrasi. Setiap kebijakan diharapkan harus bernilai *Reform*,tidak hanya melakukan kegiatan rutin semata, (seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasjojo,2-4-2012, www.berita2.com)

Kata Kunci : Reformasi Birokrasi,MDGs 2015 di Indonesia

MDGSs (Millennium Development Goals)

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigm

pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar Hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000. Semua Negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai Pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Membangun kemitraan global untuk Pembangunan

MDGs lahir di tengah ketimpangan hubungan antar Negara yang dijalin melalui hubungan konvensional melalui organisasi donor internasional seperti ICG, ADB, World Bank, IMF dan lainnya. Ketimpangan hubungan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi, social, dan politik antar Negara maju dan Negara miskin. Tidak banyak Negara-negara miskin yang berhasil keluar dari krisis ekonomi dan politik berkat bantuan donor.

Afrika Selatan, Polandia, India dan Bolivia adalah contoh sukses bagaimana mereka sebagai Negara yang jatuh dalam kemelut krisis ekonomi dan politik, berjuang mencari donor dari Negara lain dan mematahkan negoisasi a lot IMF yang menjerumuskan mereka di lubang krisi lebih dalam. Negara-negara seperti inilah yang menginspirasi lahirnya MDGs, membukakan mata dunia bahwa program-program yang dipaksakan oleh lembaga sehebat IMF selama 20 tahun belakangan ini, ternyata tidak membantu Negara-negara bermasalah tersebut.

MDGs lahir bukan hanya dalam tataran konsep yang dipaksakan oleh PBB, akan tetapi ia lahir karena kebutuhan nyata bahwa banyak masyarakat dunia masih tergolong miskin dan kelaparan. Menurut data World Bank 2004, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit secara ekonomi, karena berada pada kategori Negara berpendapatan rendah namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi positif, berbarengan

dengan Negara lain seperti : Kamboja, Malaysia, Vietnam, China, Korea Selatan dan lainnya.

MDGs di Indonesia

Sebagai salah satu Negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah dan panjang. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan (<http://mdgs-dev.bps.go.id>, diakses 1-7-2012).

Di Indonesia sendiri, melalui program pencapaian MDGs, Presiden SBY mengintruksikan penjabaran butir-butir tujuan MDGs menjadi target-target yang lebih praktis. Publikasi khusus tentang laporan pembangunan pencapaian MDGs untuk pertama kalinya diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Pebruari 2004 yang kemudian dimutakhirkan pada bulan November 2007 sebagai publikasi kedua. Pada penerbitan pertama karena keterbatasan data, tujuan 8 MDGs belum dihitung, namun beberapa indikator pada tujuan 1 hingga 7 mengalami penambahan disesuaikan dengan kebutuhan menjadi 41 indikator. Sementara itu pada publikasi ke dua, 8 tujuan MDGs telah dihitung dengan melakukan beberapa modifikasi sehingga jumlah indikator keseluruhan mencapai 59 indikator (<http://mdgs-dev.bps.go.id>, diakses 1-7-2012). Bagaimanapun , program MDGs ini sangat cocok mempresentasikan masalah-masalah yang dialami Indonesia. Melalui MDGs Negara-negara lain juga saat ini berjuang menyelesaikan masalah-masalah yang sama, dengan caranya masing-masing, karena menurut Prof Dr. Sudjarwadi (UGM) Indonesia memiliki perencanaan yang baik namun implementasi perencanaan tersebut belum mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Kondisi ini juga terjadi dalam pencapaian target-target MDGs.

Birokrasi Indonesia

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target MDGs telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam berbagai bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dilaksanakan melalui pencapaian 11 (sebelas) prioritas nasional dimana salah satunya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Pedoman Penyusunan RAD MDGs, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,

2010). Sebelum membahas reformasi birokrasi terlebih dulu kita bahas mengenai konsep birokrasi, dan bagaimana gambaran birokrasi di Indonesia.

Birokrasi, istilah birokrasi semula dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang physiocrat Perancis Vincent de Gournay yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan system pemerintahan Prusia di tahun 1745. Persoalan birokrasi ini memang sangat kompleks dan setiap orang, bahkan para ahli sendiri pun mempunyai cara pandang masing-masing dalam menjelaskan birokrasi (Marzuki diakses dari staff.uny.ac.id, tanggal 1-7-2012).

Definisi tentang birokrasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi pertama 1989 terbitan Balai Pustaka menyebutkan bahwa birokrasi adalah system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarkhi dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Birokrasi menurut Sujamto seperti yang dikutip dalam Sarundajang (2012) menyebutkan bahwa : “birokrasi adalah segala aspek yang terkait dalam pengkridaan wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintah melalui para pejabat atau pegawainya.

Salah satu dari sepuluh pola untuk memahami birokrasi menurut Jan-Erick Lane (1987) seperti yang dikutip dalam Wicaksono (2006) adalah *professional administration*. Administrasi professional merupakan pendekatan sosiologis yang memandang birokrasi sebagai sebuah bagian dari tipe organisasi. Referensi utamanya adalah tipe ideal birokrasi Max Weber. Max Weber menyatakan pula bahwa sebagai bentuk representasi organisasi, aktivitas birokrasi merupakan rasionalisasi aktivitas kolektif guna mencapai tingkatan tertinggi dari efisiensi.

Perkembangan Birokrasi di Indonesia

Birokrasi di Indonesia mempunyai beberapa ciri berdasarkan masa dimana birokrasi tersebut diterapkan. Menurut Munir (2012) menyebutkan bahwa :

1. Birokrasi masa kerajaan

Ciri-ciri birokrasi pada masa kerajaan:

- a. penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi;
- b. administrasi adalah perluasan rumah tangga istananya;
- c. tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja;
- d. gaji dari raja kepada pegawai kerajaan pada hakekatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak raja;
- e. para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat, seperti halnya yang dilakukan oleh raja .

2. Birokrasi masa kolonial

Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial (Binnenlandsche Bestuur) yang mengenakan sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain, sistem administrasi tradisional (Inheemsche Bestuur) masih tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda.

3. Birokrasi masa orde lama

- a. Pada masa awal kemerdekaan terdapat dilema dalam pengaturan aparatur pemerintah. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai yang telah berjasa mempertahankan kemerdekaan, namun relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintah Belanda yang memiliki keahlian, namun dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap Negara Indonesia.
- b. Penerapan bentuk pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringinya telah membawa konsekuensi pada seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara politik.

4. Birokrasi masa orde baru

- a. Pemerintahan orde baru muncul dengan ditopang oleh tiga pilar kekuatan utamanya, yakni militer, Golkar dan birokrasi pemerintah. Ketiga pilar kekuatan politik tersebut merumuskan berbagai kebijakan politik ekonomi yang memiliki dimensi luas bagi kehidupan masyarakat.
- b. Dalam rangka pengendalian birokrasi yang efektif dalam menjangkau sasaran pembangunan, pemerintah membentuk jaringan organisasi birokrasi pemerintahan yang mampu menjangkau sampai ke lapisan terbawah, mulai pusat sampai desa/kelurahan secara hierarkis.
- c. Birokrasi pemerintah menjadi institusi yang menjadi kepanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat melalui berbagai kebijakannya sehingga sosok birokrasi lebih berorientasi abdi negara dari pada sebagai abdi masyarakat.

5. Birokrasi masa reformasi (1)

- a. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa selama masa pemerintahan orde baru berkuasa seperti kasus-kasus korupsi, nepotisme dan kolusi.
- b. Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisismultidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini.
- c. Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel.
- d. Birokrasi diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, dengan memberikan pelayanan prima melalui instrumen lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

Birokrasi masa reformasi (2)

- a. Harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan tampaknya masih sulit diwujudkan. Bahkan kecenderungan perilaku birokrasi yang masih korup dan belum mengubah kultur pelayanan kepada publik, semakin terlihat pada masa reformasi.
- b. Birokrasi di Indonesia saat ini masih dikuasai oleh kekuatan yang begitu terbiasa berperilaku buruk selama puluhan tahun, birokrasi tidak hanya mengidap virus kleptomania, tetapi juga virus anti reformasi.
- c. Masih belum efektifnya upaya penegakan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi pemerintah, disertai masih lemahnya pula sistem kontrol internal birokrasi pemerintah, menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi pemerintah masih terus berlangsung.

Posisi Birokrasi Dalam Hubungan Antara Masyarakat dan Negara

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu organisasi menurut Rahman (2002:136) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) katagori, yakni:

- a. Birokrasi Pemerintah Umum, yaitu serangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari pusat sampai daerah yang bersifat mengatur (regulative-function).
- b. Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan,

seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang fungsi pokoknya adalah development-function atau *adaptive-function*.

- c. Birokrasi Pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah service (pelayanan) langsung kepada masyarakat. (Munir, 2012).

Patologi Birokrasi

Tak dapat dipungkiri pada implementasi kegiatan birokrasi, seringkali dijumpai apa yang dinamakan dengan Patologi Birokrasi. Arti patologi sendiri dalam ilmu kedokteran adalah ilmu tentang penyakit. Pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia, meskipun sekaligus dimaklumi bahwa tidak ada manusia yang menderita semua jenis penyakit tersebut. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan Negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang bersifat politis, ekonomi, *sosio cultural* dan teknologikal.

Perebutan kekuasaan dan kewenangan yang tidak didasarkan kepada profesionalisme, rasionalisme, dan moralitas merupakan suatu penyakit atau patologi dalam birokrasi (Makmur, 2009).

Menurut Siagian (1994), Patologi birokrasi dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok yaitu :

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negative.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Ruang Lingkup Patologi Birokrasi

- a. ***Disfunctions of bureacracy***, yaitu berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakter birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.

- b. **Mal-administration**, yaitu berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disuap, meliputi: perilaku korupsi, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi (Munir, 2012)

Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pencapaian MDGs 2015 di Indonesia

Reformasi yang digulirkan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat, yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998, bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa selama masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, seperti kasus korupsi, nepotisme dan kolusi (Dwiyanto, dkk, 2002).

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi tampaknya belum dapat sepenuhnya dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia.

Reformasi birokrasi diakui oleh sebagian kecil aparat birokrasi mempunyai dampak positif secara internal. Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa di lingkungan birokrasi saat ini, muncul kebiasaan aparat bawahan yang berani secara terbuka mengajukan kritik kepada pimpinannya walaupun diakui jumlahnya masih sangat sedikit, dan dengan cara yang halus dan sopan.

Reformasi merupakan perubahan (transformasi) yang terencana, yang berfokus pada perubahan kelembagaan yang berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi. Lingkup birokrasi yang dimaksud adalah institusi pelaksana fungsi pemerintahan di bidang eksekutif, baik di level nasional maupun daerah. Reformasi di Indonesia dimaknai sebagai media melakukan pendefinisian ulang peran pemerintah. Peran pemerintah yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi adalah peran pemerintah moderat, dalam arti bukan *minimal state* yang lingkup fungsinya terbatas dan menyerahkan pada mekanisme pasar dalam penyediaan barang-barang publik (*publik goods*) dan pelayanan publik, serta bukan pula *interventionist state* dengan peran pemerintah yang sangat luas dalam hampir seluruh bidang kehidupan (Mariana, dkk, 2010). Lebih lanjut Mariana, dkk (2010) menegaskan bahwa dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi strategi untuk mewujudkan profil birokrasi yang memiliki kapasitas yang kuat untuk melaksanakan peran tersebut.

Bagan 2. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025



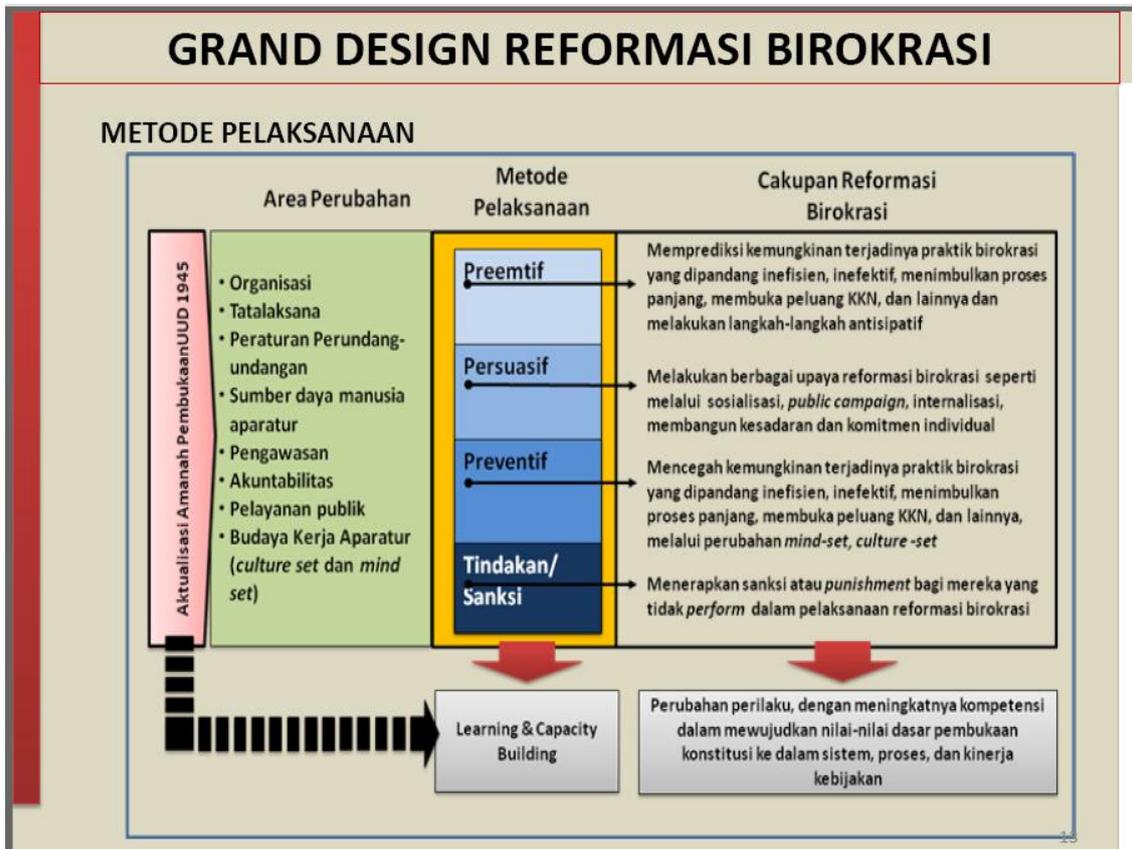
Bagan 3. Grand Design Arah Perubahan Reformasi Birokrasi

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

Area	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Bagan 4. Metode Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi



Bagan 5. Keterkaitan Grand Design dan Road Map Birokrasi di Indonesia



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM-PROGRAM

Program untuk Tingkat Makro	Program untuk Tingkat Meso	Program untuk Tingkat Mikro
1) Penataan Organisasi	1) Manajemen Perubahan	1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Tatalaksana	2) Konsultasi dan Asistensi	2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
3) Penataan Manajemen SDM Aparatur	3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3) Penataan dan Penguatan Organisasi
4) Penguatan Pengawasan	4) <i>Knowledge Management</i>	4) Penataan Tatalaksana
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja		5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		6) Penguatan Pengawasan
		7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bagan 7. Program dan Target Reformasi Birokrasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM DAN TARGET PADA TINGKATAN MIKRO

PROGRAM	TARGET
Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none">• meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;• terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda;• menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none">• menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;• meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L dan Pemda
Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none">• menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda;• meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none">• meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;• meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;• meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;• meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda
Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;• meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;• meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;• menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L dan Pemda.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none">• meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;• meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L dan Pemda;• meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;• meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing-masing K/L dan Pemda.

Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari kegiatan :

1. Sosialisasi kebijakan, visi, misi dan orientasi baru birokrasi secara internal di kalangan instansi pemerintah pusat dan daerah
2. Sosialisasi dan membangun komitmen bersama seluruh *stakeholders*
3. Penyiapan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur dengan komposisi usia, tingkat pendidikan, serta kompetensi structural dan fungsional yang diperlukan
4. Pengembangan data *based* kepegawaian yang terintegrasi dan terkomputerisasi, sehingga tersedia data sumber daya manusia aparat birokrasi yang actual dan valid
5. Pelatihan *mind setting* dan pengembangan budaya organisasi professional

Reformasi birokrasi bukan proses yang berlangsung di dalam ruang hampa, keberhasilan implementasinya bergantung kepada reformasi dalam sektor-sektor terkait lainnya, terutama sector public, hukum, ekonomi dan administrasi public. Pembentukan sector politik diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan komitmen politik dari para pengambil kebijakan. Pembentukan sector hukum diperlukan untuk menyediakan perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi, terutama terkait dengan pemberantasan KKN.

Penegakan hukum juga jadi kata kunci yang penting untuk menjamin agar terjadi perubahan kultur birokrasi ke arah yang lebih professional dan beretika. Sementara pembentukan di sector ekonomi diperlukan untuk menjamin agar reformasi dalam jangka panjang didukung dengan kapasitas keuangan yang memadai dan senantiasa terintegrasi dengan pembentukan dalam system anggaran sehingga prinsip efisiensi dapat dicapai. Perubahan-perubahan dalam berbagai dimensi tersebut memerlukan pendekatan dan dukungan system administrasi publik yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip good governance dan sumber daya manusia aparatur Negara yang memiliki integritas, kompetensi dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut baik dalam jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Mariana, dkk, 2010)

Kesimpulan

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas Pembangunan Nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target MDGs telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam berbagai bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nasional yang

tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dilaksanakan melalui pencapaian 11 (sebelas) prioritas nasional dimana salah satunya adalah dengan melakukan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.Reformasi Birokrasi sebagai upaya transformasi atau perubahan yang direncanakan merupakan proses yang berkelanjutan dimana keberhasilan implementasinya bergantung kepada reformasi dalam sektor-sektor terkait lainnya terutama sektor politik, hukum, ekonomi dan administrasi publik.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto,2002. *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM
- Makmur. 2009. *Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasidan Organisasi*. Bandung : Reflika Aditama
- Mariana, Dede, dkk. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara. (Reformasi Birokrasi dan E-Governance)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sarundajang. 2005. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Siagian, Sondang. 1994. *Patologi Birokrasi . Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wicaksono,Widya, Kristian.2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*.Yogyakarta : Graha Ilmu
- Munir, Misbachul. 2012. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Makalah : Materi disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial UNESA tanggal 17 April 2012.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional .2010. Panduan Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah (RAD MDGs).
- <http://my-publicjournal.blogspot.com>. Reformasi Birokrasi di Indonesia.
- <http://staft.uny.ac.id>. Marzuki. 2012. Model Birokrasi pemerintah Era Otonomi Daerah.
- <http://mdgs-dev.bps.go.id>. MDGs di Indonesia.
- <http://muda.kompasiana.com>. SBY, Indonesia, dan MDGs
- <http://www.berita2.com>. Kementerian PAN dan RB Harus Jadi Role Model.

